



ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA CERDAS (SMART CITY) SEBAGAI UPAYA MENDORONG TRANSFORMASI DIGITAL PADA PEMERINTAH DAERAH PROV DAN KAB/ KOTA

**Drs. AKMAL MALIK, M.Si
DIRJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**





**VISI OTONOMI
DAERAH**

**“MENINGKATNYA
KUALITAS PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH
UNTUK MENCAPAI
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DALAM
MEMPERKOKOH NEGARA
KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA”**

1. Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Daerah Pada Setiap Entitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Mendorong Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat Dalam Penerapan Desentralisasi Asimetrik Dan Generik.
3. Mendorong Terwujudnya Kemampuan Dan Prakarsa Pemerintahan Daerah Terhadap Pencapaian Kinerja Dalam Mendukung Pelaksanaan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah.
4. Mewujudkan Efektifitas Kebijakan Dan Pembinaan Kelembagaan Dan Kepegawaian Pada Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
5. Meningkatkan Kapasitas Koordinasi Dan Pembinaan Pemerintahan Daerah Secara Berkesinambungan Terhadap Pelaksanaan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah.
6. Meningkatkan Keselarasan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi, Dan Tidak Bertentangan Dengan Kepentingan Umum.



LATAR BELAKANG

59,35%

Jumlah
Penduduk
Perkotaan

(2015)

82,37%

Jumlah
Penduduk
Perkotaan

(2045)

PERMASALAHAN

- PENGANGGURAN
- KESENJANGAN
- KEMISKINAN
- KEMACETAN
- POLUSI
- SAMPAH
- KRIMINALITAS
- KAWASAN KUMUH
- PEMANASAN GLOBAL
- DSB

SOLUSI CERDAS
BERBASIS
TEKNOLOGI
"SMART CITY"



**LANJUTAN KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN
SMART CITY
KEMENTERIAN DALAM
NEGERI SEBAGAI POROS
Pemerintahan
Nasional-Daerah**



**PRIORITAS PENGEMBANGAN SMART CITY DIARAHKAN
UNTUK MEMENUHI PELAKSANAAN URUSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR TERLEBIH DAHULU (PENDIDIKAN,
KESEHATAN, PEKERJAAN UMUM-PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT-KAWASAN PERMUKIMAN,
TRANSPORNASI DAN SOSIAL); PASAL 12 UU 23/2014.**



TAMBAHAN URUSAN SESUAI DAYA SAING PEMDA;





KONSEP KOTA CERDAS YANG DIRANCANG SECARA BERKESINAMBUNGAN DAN TERUS BERKEMBANG GUNA :

1

Membantu & memudahkan berbagai kegiatan masyarakat.

2

Mengelola sumber daya yang ada dengan efisien.

3

Memberikan peningkatan pelayanan publik yang menunjang peningkatan kualitas hidup seluruh warga masyarakat.

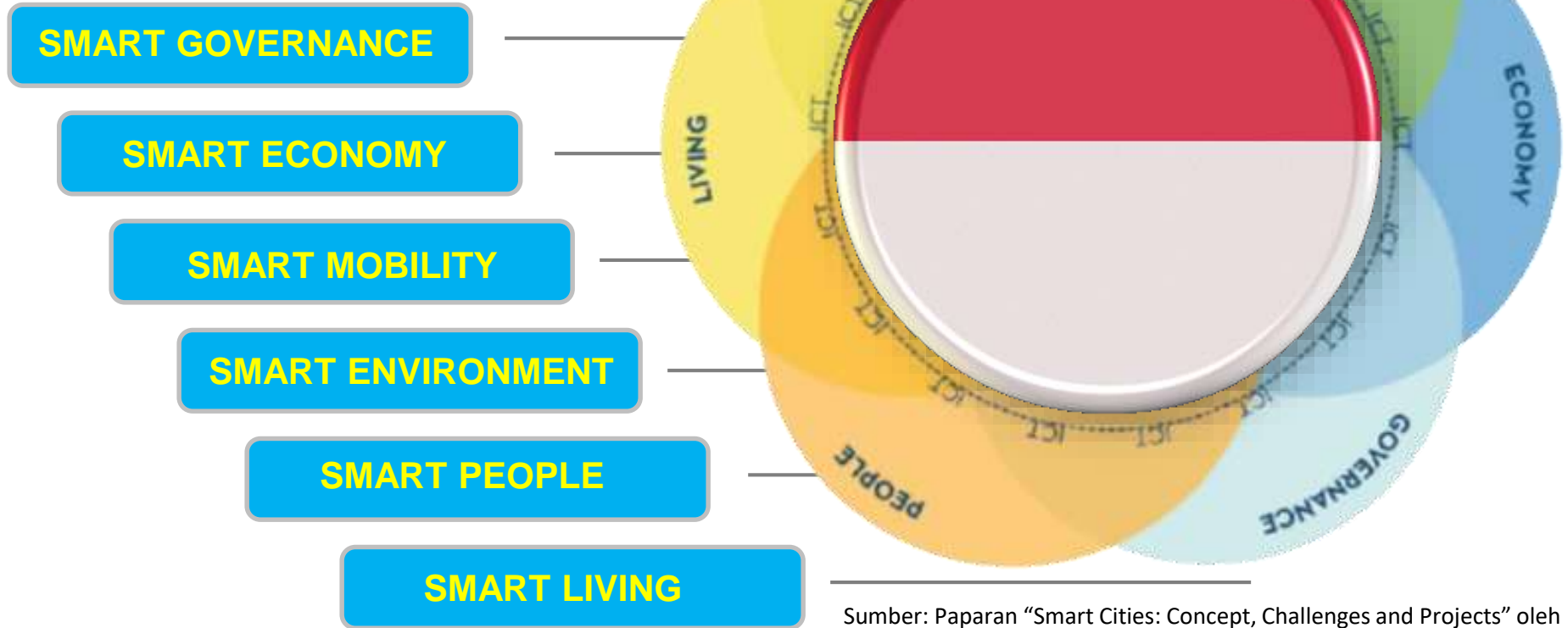
4

Hingga DAPAT mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.



Keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaporkan dalam LPPD

BERBAGAI MODEL KERANGKA SMART CITY



Sumber: Paparan "Smart Cities: Concept, Challenges and Projects" oleh ASCIMER

Faktor-faktor Pendukung Smart City

SMART ECONOMY:

1. Semangat Inovasi
2. Kewirausahaan
3. Citra ekonomi dan merk dagang
4. Produktivitas
5. Fleksibilitas dari pasar buruh
6. Keterikatan internasional
7. Kemampuan bertransformasi

SMART GOVERNANCE:

1. Partisipasi dalam pembuatan kebijakan
2. Layanan publik dan sosial
3. Pemerintahan yg transparan
4. Perspektif dan strategi politis

SMART MOBILITY:

1. Aksesibilitas lokal
2. Aksesibilitas (inter) nasional
3. Ketersediaan TIK-Infrastruktur
4. Sistem transportasi yg berkelanjutan inovatif dan aman

SMART ENVIRONMENT:

1. Daya tarik kondisi alam
2. Polusi
3. Perlindungan lingkungan
4. Pengelolaan sumber daya berkelanjutan

SMART PEOPLE:

1. Tingkat kualifikasi
2. Ketertarikan untuk belajar seumur hidup
3. Keragaman sosial dan etnis
4. Fleksibilitas
5. Kreativitas
6. Kosmopolitanisme/ket erbukaan pikiran
7. Partisipasi dlm kehidupan publik

SMART LIVING:

1. Fasilitas budaya
2. Kondisi kesehatan
3. Keamanan individual
4. Kualitas perumahan
5. Fasilitas pendidikan
6. Daya tarik wisatawan
7. Kohesi sosial



PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM PILAR SMART CITY:



| SMART ECONOMY | SMART PEOPLE | SMART GOVERNMENT | SMART MOBILITY | SMART ENVIRONMENT | SMART LIVING |
|---|---|--|---|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. KUKM 2. P'INDUSTRIAN 3. P'DAGANGAN 4. TENAGA KERJA 5. PARIWISATA 6. PANGAN 7. KELAUTAN P'IKANAN 8. P'TANIAN 9. KEHUTANAN 10. ESDM | <ol style="list-style-type: none"> 1. PENDIDIKAN 2. SOSIAL 3. KEBUDAYAAN 4. PMD 5. P3A 6. KB/KS 7. P'PUSTAKAAN 8. PU & PENATAAN RUANG | <ol style="list-style-type: none"> 1. PU & PENATAAN RUANG 2. P'TANAHAN 3. ADMINDUK 4. KOMINFO 5. PERSANDIAN 6. STATISTIK 7. P'PUSTAKAAN 8. KEARSIPAN 9. PENANAMAN MODAL | <ol style="list-style-type: none"> 1. P'HUBUNGAN 2. KOMINFO 3. STATISTIK 4. PERSANDIAN 5. PUPR | <ol style="list-style-type: none"> 1. LH 2. ESDM 3. KEHUTANAN 4. PANGAN 5. PERTANIAN 6. KELAUTAN & P'IKANAN 7. PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. BUDAYA 2. PENDIDIKAN 3. PORA 4. KESEHATAN 5. TRANTIBLINMAS 6. PARIWISATA 7. SOSIAL 8. PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIAN |

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SMART CITY KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Dimensi Kota Pintar

- Dimensi Institusional
- Dimensi Manusia
- Dimensi Teknologi

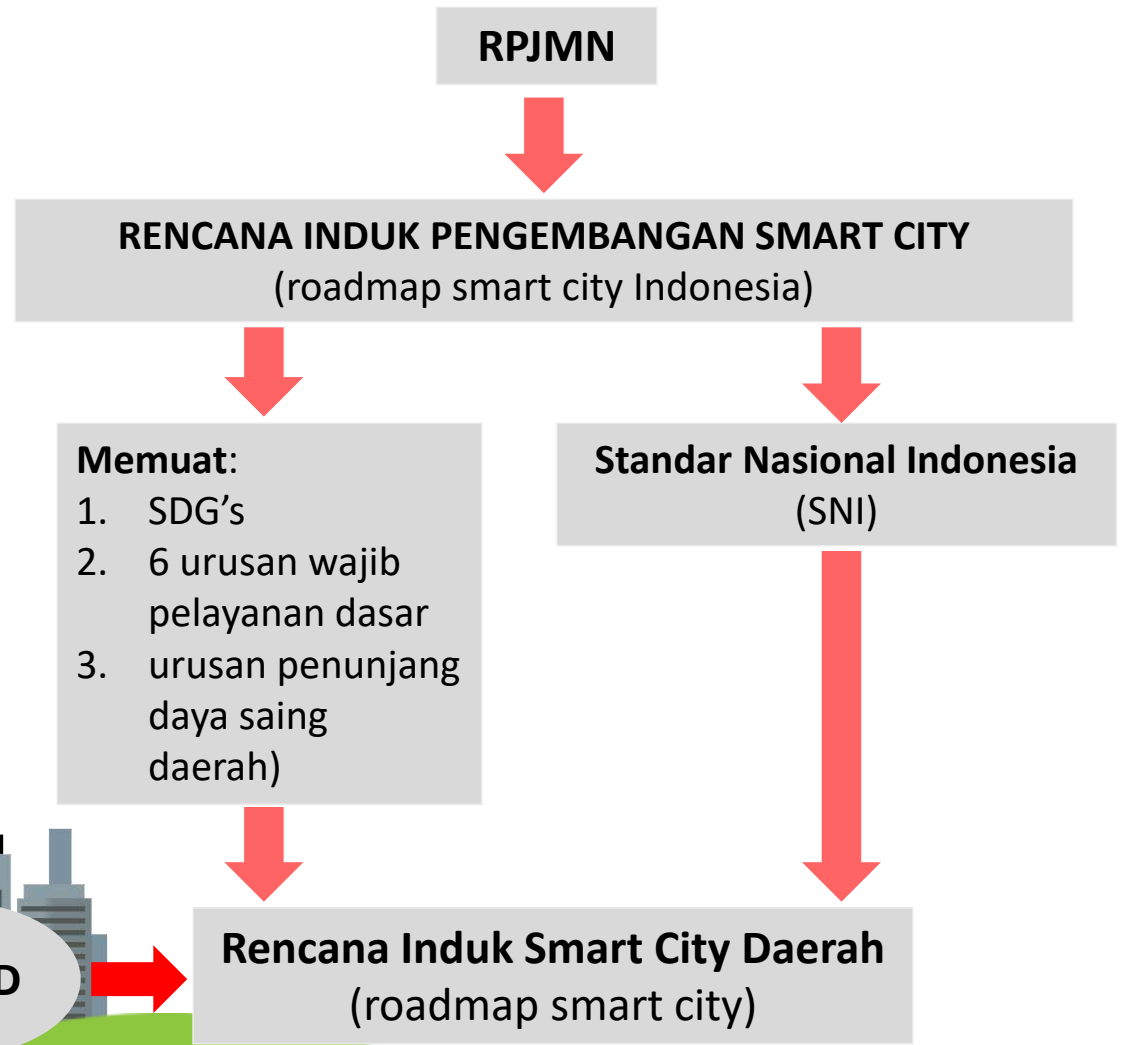


TIK hanya sebagai ENABLER, terdapat komponen dasar non teknologi yang perlu diperhatikan:

- Pemerintahan & Kelembagaan
- Kebijakan Politik
- Manajemen & Organisasi
- Masyarakat

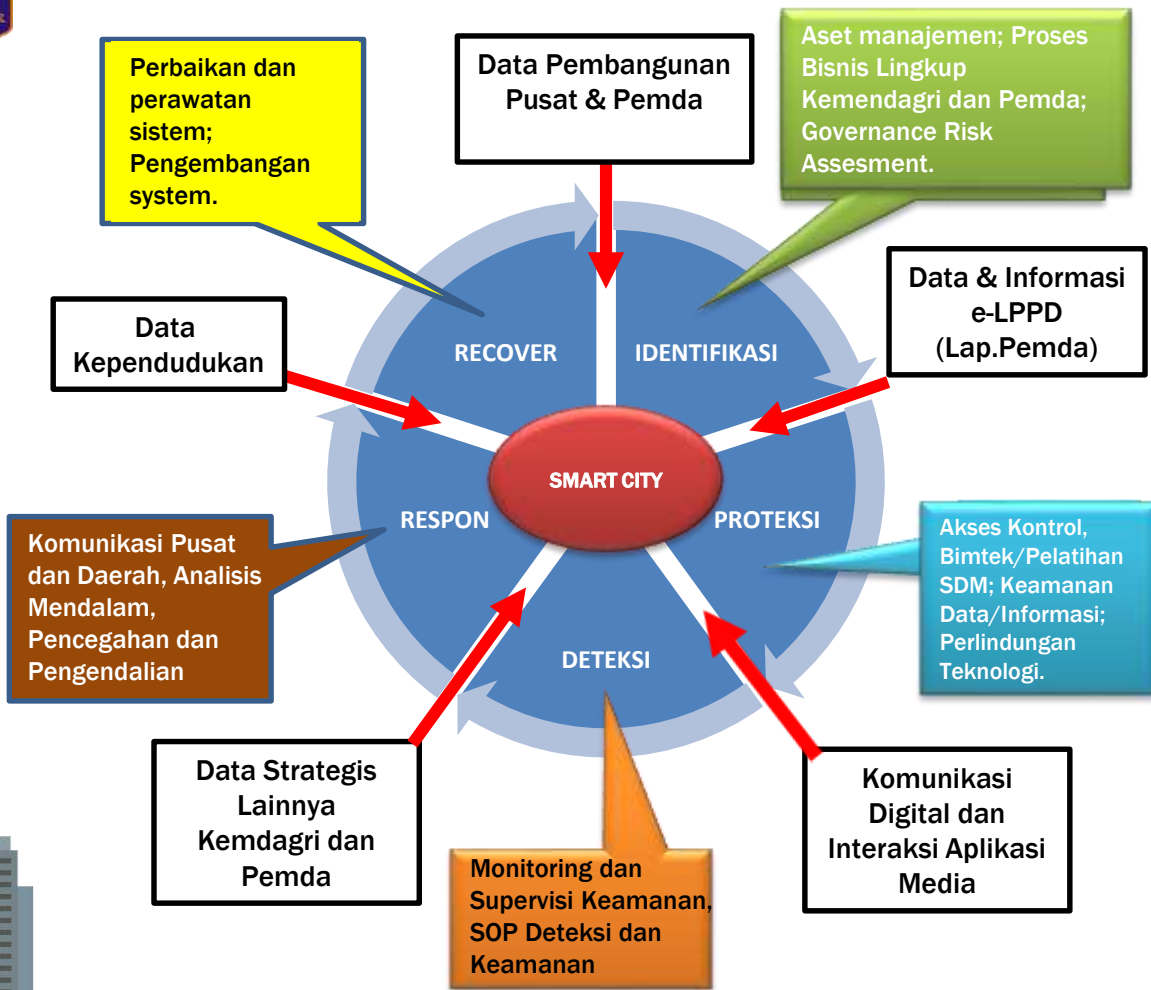


ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SMART CITY KEMENTERIAN DALAM NEGERI





PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENGEMBANGAN SMART CITY



LANGKAH BERSAMA LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA:



1. **Penyusunan Pedoman Pengembangan Kota Cerdas;**
2. **Pelatihan kota pintar untuk bekerjasama dengan UGM;**
3. **Mendukung gerakan menuju 100 smart city;**
4. **Penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pengembangan Kota Cerdas mengacu pada ISO 37120:2018 (sustainable cities and communities -- Indicators for city services and quality of life);**
5. **Berperan aktif dalam ASEAN Smart Cities Network.**



SMART CITY ACTION PLAN



DKI JAKARTA



MAKASSAR



BANYUWANGI

| DKI JAKARTA | | MAKASSAR | | BANYUWANGI | |
|--|---|---|---|--|---|
| OK OTRIP (JAK LINGKO) | OK OCE | DOTTORO'A | SIPAKATAU | INDUSTRI & INOVASI | HEALTHCARE |
| (INTEGRASI METODE PEMBAYARAN TRANSPORTASI) | (PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DI KECAMATAN) | (HOME CARE) (PELAYANAN KESEHATAN KE RUMAH RUMAH) | (SISTEM PAJAK TERPADU) PEMABAYARAN PAJAK TERPADU | PENINGKATAN DAYA SAING KAB. BANYUWANGI | LAYANAN JEMPUT BOLA UNTUK PELAYANAN KESEHATAN |





LANGKAH BERSAMA LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA:



Perlu dilakukan:



Penyusunan framework nasional pengembangan smart city;



Koordinasi dan berbagi peran dalam teknis pengembangan smart city;



Pemantapan infrastruktur dan pengamanan smart city.

The background is a digital-themed composition. The left side is a dark red field with several glowing blue circles of varying sizes. A wavy, semi-transparent blue shape separates this from the right side, which shows a blurred cityscape at night with glowing windows and several prominent glowing blue circles, some with concentric rings, suggesting a network or data visualization.

Terima Kasih